

Jumlah ASN Pemkot Tangsel yang Terpapar Covid-19 Meningkat

TANGSEL (IM)- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) meningkat pada Januari 2021.

Berdasarkan data Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Tangsel, pada periode 11-25 Januari 2021, tercatat ada 58 pegawai Pemkot Tangsel yang dilaporkan terkonfirmasi positif.

Kepala BKPP Tangsel, Apendi menjelaskan, kasus Covid-19 terbaru ditemukan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (Dispekimta) Tangsel. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah ASN yang terpapar positif di organ

perangkat daerah (OPD) tersebut. “Kemarin ditemukan (kasus baru) di Disperkimta. Sekarang diisolasi,” ujar Apendi saat dikonfirmasi, Selasa (26/1). Untuk itu, Apendi mengingatkan agar para ASN tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tidak bepergian selama pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Menurut dia, saat ini pihaknya masih menerapkan kebijakan WFH 75 persen. Hanya 25 persen pegawai yang bekerja di kantor untuk mengantisipasi penularan di lingkungan kerja. “Intinya gini, yang paling penting saya ingatkan kepada para ASN di rumah saja jangan kemana-mana. Jangan sampai bekerja dari rumah, malah berkebalikan,” pungkasnya. ● **pp**

11 Ribu Dosis Vaksin Perdana untuk Nakes Kab. Tangerang

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi memulai kegiatan vaksinasi Covid-19 pada akhir Januari 2021. Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pada vaksinasi perdana tersebut, Pemkab Tangerang mendapatkan jatah sebanyak 11 ribu dosis vaksin yang akan diperuntukkan terlebih dahulu untuk tenaga kesehatan (nakes).

“Ada 44 puskesmas di Kabupaten Tangerang yang tenaga kesehatannya mendapat suntikan vaksin secara bertahap, jumlahnya sekitar 11 ribu,” ujar Zaki dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (26/1).

Zaki menargetkan sekitar akhir Februari 2021, penyuntikan vaksin terhadap seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Tangerang dapat terealisasi. Pemberian vaksin tersebut, lanjutnya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin aman dan halal.

“Saya bersama Kepala Daerah di Banten sudah melakukan vaksin di Pendopo Bupati Tangerang beberapa hari yang lalu, ini untuk memotivasi masyarakat bahwa vaksin ini aman dan halal. Masyarakat jangan ragu dan takut untuk juga disuntik

vaksin,” ungkapnya.

Zaki mengingatkan, pemberian vaksinasi tersebut bukanlah untuk menghindari pasien dari Covid-19. Masyarakat harus tetap disiplin protokol kesehatan dengan menjalankan 4M.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Desiriana Dinardianti menambahkan, sejak 22 Januari 2021 lalu, Pemkab Tangerang menerima vaksin dari Provinsi Banten. Kemudian, kegiatan vaksinasi pun dimulai pada 25 Januari 2021.

“Jumlah vaksin yang diterima Pemkab Tangerang sebanyak 22.200 dosis vaksin, dan 11 Ribu lebih vaksin diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Saat ini yang pertama datang dan prioritas kita berikan untuk tenaga kesehatan,” ujar Desi.

Menurut Desi, saat ini pihaknya tidak mengalami kendala yang berarti, namun dia menyebut adanya kendala teknis ihwal penyimpanan vaksin. “Seperti cool box atau freezer untuk menyimpan vaksin itu yang masih menjadi kendala di lapangan karena vaksin tersebut harus ditempatkan dan disimpan pada wadah yang bersuhu dingin antara 2 sampai 8 derajat celsius,” katanya. ● **pp**



IDN/ANTARA

TERMINAL RUSAK DAN TERBENGKALAI DI BOGOR

Sejumlah awak angkutan kota menunggu penumpang di Terminal Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa, (26/1). Tidak terawatnya infrastruktur terminal dan rusaknya jalan hingga tergenang air menyebabkan aktivitas penumpang terganggu serta mengurangi kenyamanan.

Upah Penggali Makam di Tangsel Belum Dibayar

Penggali makam protes perubahan sistem pembayaran upah yang kini akan dibayarkan di setiap pekannya. Sementara sebelumnya, dibayarkan di setiap harinya. Perubahan sistem pembayaran upah itu dilakukan atas adanya kendala pencairan anggaran yang berasal dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) Pemkot Tangsel.

TANGSEL (IM)- Persewaan pembayaran upah para penggali makam Covid-19 di Tangsel, menjadi polemik tersendiri bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam upayanya menangani penyebaran virus korona.

Hal ini dikarenakan adanya aksi protes yang dilakukan para penggali makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jombang, Ciputat, Tangsel, Senin (25/1) kemarin.

Mereka memprotes perubahan sistem pembayaran upah yang kini akan dibayarkan di setiap

pekannya. Sementara sebelumnya, dibayarkan di setiap harinya.

Begitulah paparan Kasi Pemakaman Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) Tangsel, Nazmudin, saat ditemui di area pemakaman TPU Jombang. “Katakanlah utang, jadi mereka punya tabungan dua lubang makam yang sudah dikerjakan, mau dibayar di akhir minggu ini,” kata Nazmudin, Selasa (26/1).

Ia menjelaskan, perubahan sistem pembayaran upah itu dilakukan atas adanya kendala

pencairan anggaran yang berasal dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) Pemkot Tangsel.

“Karena kita mengupayakan dana untuk pembayarannya ini tidak gampang. Jadi kita mencari. Kemudian, ya mudah-mudahan kalau perminggu kita ada kesempatan untuk mencari. Sambil menunggu dana BTT yang belum turun,” terangnya.

BTT yang tak kunjung cair tersebut, merupakan pengajuan anggaran pada tahun 2021. Untuk mengantisipasi ini, selama ini upah para penggali dibayarkan menggunakan uang pengelola makam.

“Ini dana talangan nih, yang kita bayarkan kepada mereka tiap minggu ini nantinya. Kalau dana sudah turun mah mau dibayarkan tiap hari atau minggu juga tidak ada masalah,” tuturnya.

Ia pun berharap, agar anggaran pengajuan tersebut dapat segera cair. “BTT untuk tahun ini sedang kita ajukan. Mudah-mudahan segeralah agar

permasalahan pembayaran tukang gali khususnya ini, tidak tersendat-sendat. Karena kita selama ini pinjam, cari sana sini lah untuk talangan pembayaran,” pungkasnya.

Unjuk Rasa

Sejumlah penggali makam khusus Covid-19 menggelar unjuk rasa tepat di depan gerbang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (25/1) kemarin. Aksi protes dilakukan lantaran mereka belum menerima pembayaran, hingga proses pemakaman yang sudah mereka kerjakan telah rampung.

Dalam melakukan unjuk rasa tersebut, mereka turut membawa sejumlah atribut dengan bertuliskan sejumlah tuntutan. Salah satu tuntutan, bertuliskan “Kami tim gali TPU Jombang. Menolak memakamkan sebelum hak kami terpenuhi”.

Untuk menyelesaikan masalah ini pihak pengelola mengumpulkan para penggali dalam

suatu ruangan, untuk diberikan penjelasan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangsel, beserta unsur TNI.

Usai pertemuan dilakukan, mulai terlihat sejumlah penggali yang mengikuti unjuk rasa, pergi meninggalkan area pemakaman, dengan raut wajah kecewa tanpa berkomentar lebih lanjut. “Enggak dapat bayaran, mending pulang saja,” ujar salah satu penggali sembari meninggalkan area pemakaman.

Kepala Seksi Pemakaman Disperkimta Tangsel, Nazmudin menyebut bahwa aksi protes tersebut hanyalah kesalahpahaman terkait perubahan sistem pembayaran upah, yang semula harian. Kini menjadi mingguan.

“Ya jadi ini awalnya dibayar oleh pengelola tukang gali itu setiap hari, misalnya ada lima dibayar lima. Nah untuk hari ini rencananya kita bayar perminggu. Jadi demo itu karena ada perubahan dibuat sistem dari harian bayarannya menjadi setiap minggu,” ujar Nazmudin. ● **pp**

Sanitasi Buruk, Puskesmas Jurumudi Baru Diprotes Warga

TANGERANG (IM)- Akibat penanganan limbah medis dan sanitasi yang kurang diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Tangerang, keberadaan Puskesmas Jurumudi Baru yang berada di Kecamatan Benda, Tangerang diprotes warga. Terlebih Puskesmas tersebut kini menjadi salah satu rumah lawan Covid-19 yang dioperasikan Pemkot Tangerang.

Warga takut, sanitasi yang kurang baik itu dapat berpengaruh pada kondisi lingkungan dan berimbas pada penyakit yang mungkin saja muncul dari buruknya sanitasi di Puskesmas tersebut. Hal itu diungkapkan Ketua RW 06 Kelurahan Jurumudi, Ahmad Basori, kemarin. “Sejumlah warga di RW 06 Kelurahan Jurumudi banyak yang protes dengan keberadaan Puskesmas Jurumudi Baru yang limbah medisnya banyak yang merembes ke aliran saluran air perumahan warga,” ungkap Ahmad Basori.

“Banyak yang tanya soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Karena sampai merembes (limbah

medis) itu saja kan sudah salah. Itu kan bukan terjadi karena seuseai hujan saja tapi sudah sering,” ungkap Ahmad Basori.

Ditambahkannya, protes warga ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Bahkan pertemuan antara warga dengan pihak puskesmas pun sempat terjadi pada Oktober 2020 lalu. Saat itu pihak Puskesmas berjanji akan memperbaiki sanitasi yang dinilai tak berfungsi baik itu.

“Mereka (pihak Puskesmas Jurumudi Baru) sudah menjanjikan perbaikan rembesan itu tapi tidak ada respons sampai sekarang. Oleh sebab itu, warga meminta untuk menghentikan aktivitas layanan puskesmas berdiri dan beroperasi. Itu sesuai Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung,” lanjutnya.

Pihaknya pun bakal menempuh jalur formal dengan melaporkan permasalahan tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang. Hal ini terpaksa dilakukan bila

tidak ada tanggapan serius dari Pemkot Tangerang. “Harus diselesaikan AMDAL-nya. Kalau secara kasat mata memang IPAL-nya buruk,” tegasnya.

Dihubungi terpisah Camat Benda, Ahmad Suhady mengklaim kalau Puskesmas Jurumudi Baru sudah memenuhi standar yang ditentukan. Hal ini setelah dilakukan pengecekan oleh Dinas Perkim, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan Kota Tangerang. “Kita sudah berupaya segala pembuangan limbah di puskesmas ini memang betul-betul aman bagi masyarakat sekitar. Karena setelah dicek IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)-nya sudah berfungsi dengan baik. Limbah yang ada di Puskesmas sudah diproses sebelum dibuang,” kata Ahmad Suhady.

“Sejauh ini kita masih menunggu hasil laporan dari Dinas Lingkungan Hidup. Setidaknya beberapa hari belakangan kita menunggu dari (Dinas) L.H. Kita cek PH-nya normal di angka 7,7,” tutur Suhady. ● **ans**

Polresta Tangerang Ciduk Empat Pengecer Judi Togel

TANGERANG (IM)- Aparat Polresta Tangerang, Banten menciduk empat pengecer dan pengepul judi jenis togel yang beraksi di Desa Cileles dan Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, masing-masing In (56), Sy (42), Hs (41) dan Om (47). “Penangkapan para tersangka itu setelah mendapatkan informasi dari warga dan dilakukan pengembangan serta pendalaman kasus,” kata Kapolresta Tangerang, Kombes Wahyu Sri Bintoro di Tangerang, Selasa (26/1).

Wahyu mengatakan informasi awal diperoleh di kawasan Tigaraksa karena ada seseorang yang melakukan kegiatan sebagai pengecer judi togel Hongkong dan Singapura. Menurut dia, setelah melakukan pendalaman, petugas kemudian meringkus In di Desa Cileles, Tigaraksa, saat ditangkap. In sedang melayani pemasangan dan petugas mengamankan barang bukti berupa kertas rekapan dan nomor yang dipasang pejudi.

Meski begitu peran In sebagai pengecer dan dari keterangan itu petugas berupaya melakukan pendalaman dan menangkap tersangka lainnya. Bahkan petugas kemudian In yang menyertorkan kepada tersangka Sy lalu menangkap di rumahnya di Desa Sodong, Tigaraksa.

Wahyu mengatakan dari pengakuan Sy bahwa hasil setoran judi itu lalu diserahkan ke tersangka Om. Tersangka kini diamanakan di Mapolresta Tangerang untuk penyidikan lebih lanjut. Mantan Direktur Narkoba Polda Sumbang itu mengatakan petugas menjerat para tersangka dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Wahyu menambahkan akan terus mengejar sindikat judi togel hingga bandar dan bagi warga yang mengetahui agar melaporkan kepada aparat kepolisian setempat. Pihaknya mengimbau untuk menjauhi praktik judi karena setiap kegiatan tersebut akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. ● **pp**

Pusat Belanja dan Restoran Boleh Buka Sampai Jam 8 Malam

TANGERANG (IM)- Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah mengungkapkan jam operasional pusat belanja dan restoran di Kota Tangerang bisa buka hingga pukul 20.00 WIB dari yang sebelumnya hanya bisa hingga pukul 19.00 WIB.

Ia mengatakan aturan jam operasional tersebut tertuang dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 sesuai keputusan dari Pemerintah Pusat. “Kalau sebelumnya pusat belanja hanya sampai pukul 19.00 WIB, sekarang boleh buka sampai 20.00 WIB. Selebihnya, aturan di PSBB masih sama dengan yang sebelumnya,” kata Wali Kota Tangerang Arief R Wisnansyah di Tangerang, Selasa (26/1).

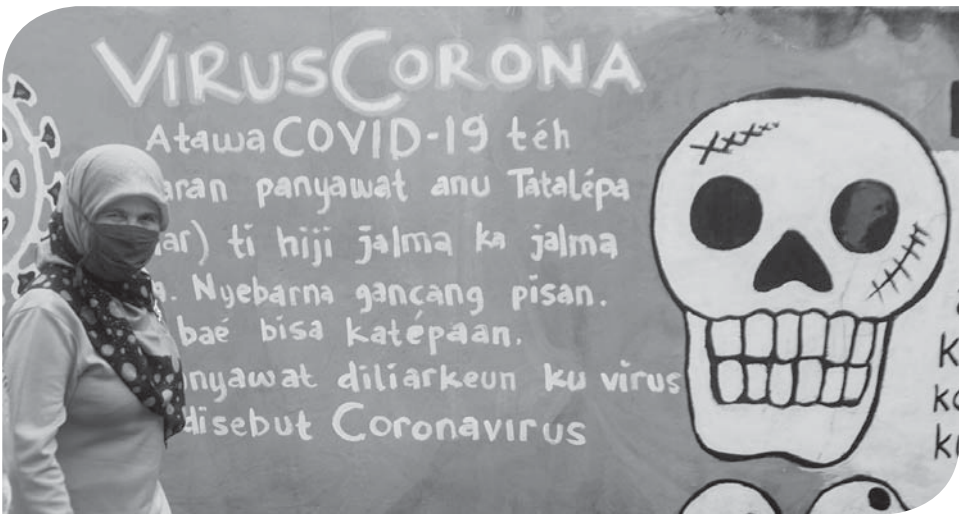
Secara garis besar, aturan yang berlaku dalam penerapan PSBB di Kota Tangerang masih sama dengan aturan yang sebelumnya berlaku. “Hanya sedikit perbedaan, di antaranya jam operasional restoran dan pusat perbelanjaan,” katanya.

Kota Tangerang menjadi

salah satu daerah yang wajib menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali yang berlaku mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 sesuai keputusan dari Pemerintah Pusat.

Wali Kota mengungkapkan Pemkot Tangerang kembali memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menunjang aturan PPKM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. “Untuk itu, Pemkot sudah memperbarui surat edaran maupun aturan pendukungnya,” katanya.

Sebagai informasi, adapun aturan yang dikeluarkan oleh Pemkot Tangerang antara lain Peraturan Wali Kota Tangerang No.5 tahun 2021 dan Surat Edaran No. 443.1/231-Bag.Huk./2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. “Harapannya semua bisa berkontribusi dalam menekan penyebaran Covid-19 di Kota Tangerang,” kata Wali Kota. ● **pp**



IDN/ANTARA

MURAL EDUKASI CEGAH COVID-19

Warga melintasi mural edukasi pencegahan Covid-19 berbahasa Sunda di Pandeglang, Banten, Selasa (26/1). Mural tersebut bertujuan sebagai media edukasi untuk mengingatkan warga agar menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) guna mencegah potensi penyebaran bahaya Covid-19.



IDN/ANTARA

TEKNOLOGI SISTEM PERTANIAN MULSA PLASTIK

Petani memasang mulsa plastik hitam perak (MPHP) untuk ditanami mentimun di lahan pertanian kawasan Laladon, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/1). Bertani dengan menggunakan sistem MPHP bertujuan untuk mengurangi resiko gagal tanam karena hama, dan dinilai efisien dari segi penyiraman, pemupukan dan pemeliharaan tanaman.

Warga Tolak Wacana Tangsel Buang Sampah ke TPSA Cilowong

SERANG (IM)- Eni Ju-maeni, Ketua RT 12 Lingkungan Pasir Gadung Wadas, mengatakan, warga sekitar menolak rencana kerja sama Pemerintah Kota Serang yang akan menerima sampah dari Kota Tangsel dibuang ke TPSA Cilowong karena dianggap akan merugikan mereka.

“Warga di sini akan menolak karena kami takut akan ada bencana longsor. Ini kan imbasnya ke masyarakat. Sudah ada buktinya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (26/1). Oleh karena itu, demi mengantisipasi munculnya bencana (di antaranya sebagai akibat dari terjadinya pada Januari 2019), warga di lingkungannya menolak wacana pembuangan sampah dalam jumlah ratusan ton tersebut ke TPSA Cilowong.

“Sampah dari kabupaten dan kota saja kan sudah banyak, apalagi ditambah dari Tangsel. Nambah banyak lagi nanti,” ungkap Ju-maeni.

Dia mengkhawatirkan terjadinya bencana longsor karena tumpukan sampah di TPSA Cilowong saat ini berantakan, tidak seperti pada 2020 yang lalu.

“Sekarang acak-acakan sampahnya. Tingginya saja 30 meter kalau perkiraan saya, mah. Tambah waswas sama tambah tidak bisa tidur,” katanya.

Dia berharap Pemerintah Kota Serang mendatangkan warga terlebih dahulu untuk memusyawarahkan agar keluhan-keluhan masyarakat sekitar diketahui.

“Ini tidak ada sosialisasinya. Beberapa hari kemarin saya disuruh datang ke kantor kelurahan. Itu juga lewat telepon. Saya sengaja tidak datang, pasti disuruh tanda tangan. Kita, sih, pengennya mereka yang ke sini,” katanya.

Pemerintah Kota Serang sendiri telah menandatangani nota ksepahaman (memorandum of understanding) dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk bekerja sama dalam penanganan sampah.

Meski secara teknis akan dibahas pada Perjanjian Kerja Sama (PKS), telah diwacanakan bahwa Pemkot Tangsel akan membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cilowong sebanyak 400 ton per hari. ● **pra**